

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia berada pada posisi 6° Lintang Utara (LU) hingga 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° Bujur Timur (BT) hingga 141° Bujur Timur (BT). Letak geografis yang strategis ini menjadikan Indonesia memiliki peran penting dalam jalur perdagangan internasional serta memengaruhi kondisi iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia juga terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga menjadikannya sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar.

Gambar 4.1 Peta Indonesia



Sumber: *arcgis.com*, 2026

Dari sisi administratif, Indonesia terbagi ke dalam 38 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Setiap provinsi memiliki karakteristik geografis, sosial,

dan ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari provinsi yang berada di wilayah barat seperti Aceh dan Sumatera Utara, hingga provinsi di wilayah timur seperti Papua dan Papua Pegunungan. Provinsi-provinsi tersebut dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah yang bertugas menjalankan kebijakan pembangunan di tingkat regional. Perbedaan kondisi antarprovinsi ini menyebabkan adanya variasi tingkat pembangunan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.

Dari sisi demografis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan alami penduduk. Kondisi ini menciptakan bonus demografi, yaitu tingginya proporsi penduduk usia produktif yang dapat menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Masyarakat Indonesia juga sangat beragam, baik dari segi suku, bahasa, maupun budaya, yang tersebar di seluruh provinsi, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural.

Dalam bidang perekonomian, Indonesia tergolong sebagai negara berkembang dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa, industri pengolahan, dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika global seperti fluktuasi harga komoditas, kondisi ekonomi dunia, dan kebijakan perdagangan internasional. Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi indikator utama

dalam mengukur kinerja ekonomi nasional, sementara di tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat perbedaan kinerja ekonomi antarprovinsi. Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Secara sosial dan budaya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keragaman yang sangat tinggi. Setiap provinsi memiliki adat istiadat, bahasa daerah, serta tradisi yang berbeda-beda, namun tetap berada dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Nilai persatuan tersebut tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, toleransi, dan solidaritas sosial masih menjadi ciri khas utama masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Dalam aspek pembangunan, Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di seluruh provinsi. Pemerintah berupaya memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta jaringan transportasi lainnya guna mendorong pemerataan pembangunan. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, setiap provinsi memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

4.1.2 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018–2025

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Provinsi yang diagregasikan menjadi nilai Rata-rata Pertumbuhan

Nasional (persen). Data yang digunakan merupakan data runtut waktu (*time series*) dengan cakupan tahun pengamatan dari tahun 2018-2025. Sumber data diperoleh secara resmi melalui publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Penggunaan PDRB ADHK 2010 ini ditujukan untuk melihat pertumbuhan ekonomi murni secara riil, di mana pengaruh perubahan harga (inflasi) telah dikeluarkan. Data ini merepresentasikan performa makroekonomi nasional yang nantinya akan disandingkan dengan variabel-variabel penelitian lainnya guna melihat dinamika, ketergantungan, serta dampaknya terhadap indikator kesejahteraan sosial dalam rentang waktu pengamatan tersebut.

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018–2025

Tahun	Rata-rata Pertumbuhan Nasional (%)
2018	5,16%
2019	5,13%
2020	-1,69%
2021	4,21%
2022	5,72%
2023	5,50%
2024	5,14%
2025	6,05%

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan data tabel 1.1, fluktuasi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2018-2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada awal periode pengamatan, yaitu tahun 2018 dan 2019, kondisi ekonomi nasional berada pada tren yang relatif stabil dengan capaian pertumbuhan masing-masing sebesar 5,16% dan 5,13%. Namun, pada tahun 2020, perekonomian mengalami guncangan hebat (*economic shock*) yang menyebabkan laju pertumbuhan berkontraksi tajam hingga menyentuh angka negatif, yaitu sebesar -1,69%.

Penurunan drastis ini merupakan implikasi langsung dari adanya pandemi global COVID-19 yang membatasi mobilitas barang dan jasa serta melesunya aktivitas industri di berbagai provinsi (Iriyadi & Purba, 2022).

Memasuki tahun 2021, sinyal pemulihan ekonomi (*economic recovery*) mulai terlihat dengan pertumbuhan yang kembali bergerak positif ke angka 4,21%. Tren positif ini berlanjut secara progresif pada tahun 2022 dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 5,72%, dipicu oleh normalisasi aktivitas ekonomi dan penguatan konsumsi domestik. Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi sedikit penyesuaian (konsolidasi) dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,50% dan 5,14%, fondasi ekonomi dinilai tetap resilien. Pada akhir tahun pengamatan, yaitu tahun 2025, rata-rata pertumbuhan nasional menunjukkan performa tertinggi sepanjang periode analisis dengan mencatatkan angka sebesar 6,05%, mengindikasikan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi jangka panjang yang diterapkan di tingkat regional maupun nasional (Modjo, 2020).

4.1.3 Kondisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2018–2025

Analisis ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator Gini Ratio (Rasio Gini). Angka Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 artinya tingkat ketimpangan pendapatan sebuah wilayah semakin tinggi, sebaliknya jika mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berskala nasional yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Secara spesifik, data ini mencakup rata-rata Gini Ratio nasional yang memotret perbandingan kondisi ketimpangan di

tingkat provinsi serta wilayah perkotaan dan perdesaan (daerah) di Indonesia selama periode 8 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018-2025.

Melalui data ini, penelitian bertujuan untuk melihat arah kebijakan ekonomi dan efektivitas program pemerataan pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam jangka menengah.

Tabel 4.2 Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2018–2025

Tahun	Rata-rata Gini Ratio Nasional
2018	0,354
2019	0,351
2020	0,350
2021	0,349
2022	0,346
2023	0,343
2024	0,336
2025	0,322

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2018–2025 menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal ini tercermin dari nilai Gini Ratio yang mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Indonesia semakin merata seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi nasional.

Pada tahun 2018, nilai Gini Ratio Indonesia tercatat sebesar 0,354. Selanjutnya, angka tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,322 pada tahun 2025. Meskipun penurunannya berlangsung secara bertahap, tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat ketimpangan tersebut juga mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mulai memberikan dampak yang lebih luas terhadap

berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok berpendapatan menengah dan rendah.

Selama periode pengamatan, laju penurunan ketimpangan relatif stabil pada tahun 2018–2021. Namun, pada periode 2024–2025 terlihat adanya penurunan yang lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemerataan ekonomi mengalami akselerasi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, serta semakin kuatnya berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

Secara umum, perkembangan Gini Ratio Indonesia selama tahun 2018–2025 menggambarkan bahwa kondisi distribusi pendapatan nasional berada pada arah yang positif. Penurunan ketimpangan yang konsisten menjadi indikator bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga mulai mengarah pada pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.1.4 Kondisi Infrastruktur Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2018–2025

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa (Persen). Data yang dianalisis merupakan data deret waktu (*time series*) tahunan dengan cakupan waktu selama 8 tahun, mulai dari tahun 2018-2025. Indikator utama yang diamati adalah nilai rata-rata nasional dari persentase rumah tangga

yang telah mengonsumsi atau memiliki akses terhadap air minum yang memenuhi syarat kelayakan kesehatan.

Tabel 4.3 Infrastruktur Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2018–2025

Tahun	Rata-rata Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak
2018	83,08
2019	84,30
2020	85,58
2021	86,83
2022	87,47
2023	88,26
2024	89,63
2025	90,25

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya tren positif yang konsisten dalam penyediaan dan kepemilikan akses air minum layak di Indonesia. Pada awal periode pengamatan (tahun 2018), rata-rata pemenuhan akses air minum layak berada di angka 83,08%. Angka ini terus merangkak naik setiap tahunnya tanpa mengalami penurunan, hingga berhasil menyentuh angka 90,25% pada tahun 2025.

Secara akumulatif, selama periode 2018 hingga 2025, terjadi peningkatan total sebesar 7,17%. Kenaikan tahunan yang paling signifikan terlihat pada transporasi dari tahun 2023 ke 2024, di mana angka akses meningkat sebesar 1,37% dalam satu tahun.

4.1.5 Kondisi PDRB Per Kapita Indonesia Tahun 2018–2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output ekonomi. PDRB per

kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk berdasarkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, maka secara umum tingkat produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga cenderung meningkat.

Tabel 4.4 Kondisi PDRB Per Kapita Indonesia Tahun 2018–2025

Tahun	Rata-rata Nasional (Juta Rupiah)
2018	47.148
2019	47.912
2020	48.499
2021	49.543
2022	51.127
2023	52.808
2024	85.368
2025	91.076

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan data rata-rata nasional tahun 2018–2025, perkembangan PDRB per kapita Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat secara konsisten. Pada tahun 2018, rata-rata PDRB per kapita nasional tercatat sebesar Rp47,148 juta. Selanjutnya, pada tahun 2019 nilai tersebut meningkat menjadi Rp47,912 juta seiring dengan kondisi perekonomian nasional yang relatif stabil sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, meskipun perekonomian global mengalami tekanan akibat pandemi, rata-rata PDRB per kapita Indonesia masih menunjukkan peningkatan menjadi Rp48,499 juta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih mampu bertahan melalui kontribusi beberapa sektor yang tetap tumbuh, seperti sektor digital, komunikasi, dan komoditas tertentu. Peningkatan tersebut kembali berlanjut pada tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp49,543

juta, yang menunjukkan mulai terjadinya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pasca-pandemi.

Memasuki periode 2022–2023, peningkatan PDRB per kapita terlihat semakin signifikan. Pada tahun 2022, rata-rata PDRB per kapita nasional meningkat menjadi Rp51,127 juta dan kembali naik menjadi Rp52,808 juta pada tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat, serta pulihnya sektor industri dan perdagangan setelah pandemi. Selain itu, peningkatan harga komoditas global juga memberikan kontribusi terhadap naiknya nilai tambah ekonomi di beberapa daerah penghasil sumber daya alam.

Perkembangan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, rata-rata PDRB per kapita nasional melonjak cukup tinggi menjadi Rp85,368 juta dan kembali meningkat menjadi Rp91,076 juta pada tahun 2025. Lonjakan tersebut menunjukkan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh berkembangnya industri hilirisasi, meningkatnya investasi, pertumbuhan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, serta penguatan transformasi digital dalam aktivitas ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB per kapita Indonesia selama periode 2018–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Kenaikan nilai PDRB per kapita dari Rp47,148 juta pada tahun 2018 menjadi Rp91,076 juta pada tahun 2025 mencerminkan adanya peningkatan produktivitas ekonomi nasional dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian

Indonesia mengalami perkembangan yang semakin kuat dan kompetitif dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum kondisi variabel penelitian selama periode 2018–2025. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif

Indikator Statistik	Y1	Y2	X1	X2
Mean	0,044025	0,343875	86,92500	59,18513
Median	0,051500	0,347500	87,15000	50.33500
Maximum	0,060500	0,354000	90,25000	91,07600
Minimum	-0,016900	0,322000	83,08000	47,14800
Std. Dev.	0,025201	0,010439	2,505554	18,07647

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji deskriptif, dapat diketahui gambaran umum mengenai perkembangan variabel pertumbuhan ekonomi (Y1), ketimpangan pendapatan (Y2), infrastruktur (X1), dan pembangunan ekonomi (X2) selama periode penelitian.

Variabel pertumbuhan ekonomi (Y1) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,044025 atau 4,40%. Nilai maksimum sebesar 0,060500 menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum sebesar -0,016900 menunjukkan terjadinya kontraksi ekonomi pada salah satu periode penelitian. Nilai standar deviasi sebesar 0,025201 menunjukkan bahwa data pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat variasi yang relatif rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata.

Variabel ketimpangan pendapatan (Y2) yang diukur menggunakan Gini Ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 0,343875. Nilai maksimum sebesar 0,354000 menunjukkan tingkat ketimpangan tertinggi, sedangkan nilai minimum sebesar 0,322000 menunjukkan tingkat ketimpangan terendah selama periode penelitian. Nilai standar deviasi sebesar 0,010439 menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data ketimpangan pendapatan relatif kecil sehingga data cenderung stabil.

Variabel infrastruktur (X1) yang diukur melalui persentase rumah tangga dengan akses air minum layak memiliki nilai rata-rata sebesar 86,92500. Nilai maksimum sebesar 90,25000 menunjukkan tingkat akses air minum layak tertinggi, sedangkan nilai minimum sebesar 83,08000 menunjukkan tingkat akses terendah selama periode penelitian. Standar deviasi sebesar 2,505554 menunjukkan bahwa variasi data infrastruktur relatif rendah dan data cenderung homogen.

Variabel pembangunan ekonomi (X2) yang diukur menggunakan PDB per kapita memiliki nilai rata-rata sebesar 59,18513. Nilai maksimum sebesar 91,07600 menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi tertinggi, sedangkan nilai minimum sebesar 47,14800 menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi terendah selama periode penelitian. Nilai standar deviasi sebesar 18,07647 menunjukkan bahwa variabel pembangunan ekonomi memiliki tingkat variasi data yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel infrastruktur dan ketimpangan pendapatan memiliki data yang relatif stabil, sedangkan variabel pembangunan ekonomi menunjukkan variasi data yang lebih tinggi selama periode penelitian.

4.2.2 Hasil Analisis Regresi Model Pertumbuhan Ekonomi

Analisis regresi linier berganda pada model pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur (X1) yang diukur melalui persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan Pembangunan Ekonomi (X2) yang diukur melalui PDRB per kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2018–2025. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi EViews 12 dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi regresi model pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Model Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-0,058586	0,575525	-0,101797	0,9229
X1	0,000943	0,007151	0,131851	0,9002
X2	0,000349	0,000991	0,352089	0,7391

Sumber: Olah data Eviews 12

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil estimasi tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y1 = -0.058586 + 0,000943X1 + 0,000349X2 + \varepsilon \quad (7)$$

Berikut interpretasi :

1. Persamaan regresi tersebut menunjukkan hubungan antara variabel infrastruktur (X1) dan pembangunan ekonomi (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1). Nilai konstanta sebesar -0,058586 menunjukkan bahwa apabila variabel infrastruktur dan pembangunan ekonomi dianggap konstan atau bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar -0,058586.
2. Koefisien regresi variabel infrastruktur (X1) sebesar 0,000943 menunjukkan bahwa setiap peningkatan infrastruktur sebesar 1 satuan

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000943 dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Koefisien regresi variabel pembangunan ekonomi (X2) sebesar 0,000349 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembangunan ekonomi sebesar 1 satuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000349 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Model Ketimpangan Pendapatan

Analisis regresi pada model ketimpangan pendapatan dilakukan untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur (X1) dan Pembangunan Ekonomi (X2) terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y2) di Indonesia selama periode 2018–2025. Variabel ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diukur menggunakan Gini Ratio, sedangkan variabel infrastruktur diukur melalui persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan pembangunan ekonomi diukur menggunakan PDRB per kapita. Hasil pengolahan data menggunakan aplikasi EViews 12 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Model Ketimpangan Pendapatan

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0,494753	0,073652	6,717482	0,0011
X1	-0,001481	0,000915	-1,618777	0,1664
X2	-0,000374	0,000127	-2,945178	0,0321

Sumber: Olah data Eviews 12

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil estimasi tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y2 = 0.494753 - 0.001481X1 - 0.000374X2 + \varepsilon \quad (8)$$

Berikut interpretasi :

1. Persamaan regresi tersebut menunjukkan hubungan antara variabel infrastruktur (X1) dan pembangunan ekonomi (X2) terhadap ketimpangan pendapatan (Y2). Nilai konstanta sebesar 0,494753 menunjukkan bahwa apabila variabel infrastruktur dan pembangunan ekonomi dianggap konstan atau bernilai nol, maka ketimpangan pendapatan diperkirakan sebesar 0,494753.
2. Koefisien regresi variabel infrastruktur (X1) sebesar -0,001481 menunjukkan bahwa setiap peningkatan infrastruktur sebesar 1 satuan akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,001481 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi variabel pembangunan ekonomi (X2) sebesar -0,000374 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembangunan ekonomi sebesar 1 satuan akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,000374 dengan asumsi variabel lain tetap.

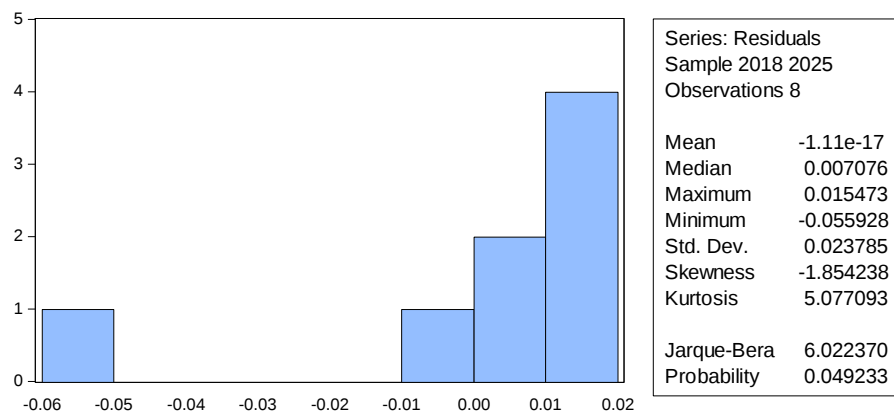
4.2.4 Uji Asumsi Klasik Model Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

1. Uji Normalitas

Menurut (Sugiyono, 2020), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik untuk digunakan dalam pengujian hipotesis adalah model yang memiliki residual yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga hasil analisis regresi dapat memberikan estimasi yang valid dan dapat dipercaya.

Hasil pengujian normalitas residual dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut :

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* (JB) sebesar 1,101716 dengan nilai probabilitas (*Probability*) sebesar 0,576455. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% ($0,576455 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Selain itu, grafik histogram menunjukkan pola penyebaran residual yang relatif simetris dan tidak mengalami kemencengan (*skewness*) yang ekstrem, yang ditunjukkan oleh nilai *skewness* sebesar -0,0144343 dan *kurtosis* sebesar 2,789621. Hasil tersebut semakin memperkuat bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Menurut (Sugiyono, 2020) Sugiyono, model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami masalah

multikolinearitas. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan bantuan aplikasi EViews 12.

Tabel 4.8 Hasil Uji *Variance Inflation Factors*

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.331229	3345.578	NA
X1	5.11E-05	3905.401	2.837110
X2	9.82E-07	37.59601	2.837110

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF), diketahui bahwa nilai *Centered VIF* pada variabel X1 sebesar 2,837110 dan variabel X2 sebesar 2,837110. Karena nilai *Centered VIF* kedua variabel tersebut berada di bawah batas toleransi 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Dengan demikian, antarvariabel independen dalam model tidak memiliki hubungan yang kuat sehingga layak digunakan dalam analisis regresi

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Sugiyono, 2020), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode *White Heteroskedasticity Test* dengan bantuan aplikasi EViews 12, dan hasil pengujiannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

White			
F-statistic	0.395032	Prob. F(5,2)	0.8260
Obs*R-squared	3.975006	Prob. Chi-Square(5)	0.5530
Scaled explained SS	3.165326	Prob. Chi-Square(5)	0.6745

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji heteroskedastisitas White, diperoleh nilai probabilitas *Obs*R-squared* sebesar 0,5530. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selain itu, nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,8260 dan *Scaled Explained SS* sebesar 0,6745 juga lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut memperkuat kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual pada model regresi bersifat konstan (homoskedastisitas), sehingga model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut

4. Uji Autokorelasi

Menurut (Sugiyono, 2020), uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan bantuan aplikasi EViews 12. Hasil pengujian autokorelasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey			
F-statistic	0.065851	Prob. F(1,4)	0.8101
Obs*R-squared	0.129569	Prob. Chi-Square(1)	0.7189

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil uji autokorelasi Breusch-Godfrey, diperoleh nilai probabilitas *Obs*R-squared* sebesar 0,7189. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,8101 juga lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, residual pada setiap periode pengamatan bersifat independen atau tidak saling berkorelasi, sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Menurut (Sugiyono, 2020), pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas (*p-value*) lebih besar dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.058586	0.575525	-0.101797	0.9229
X1	0.000943	0.007151	0.131851	0.9002
X2	0.000349	0.000991	0.352089	0.7391

Sumber: Olah data Eviews 12

1. Variabel Infrastruktur (X1): Memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9002.

Karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05), maka

disimpulkan bahwa variabel infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa infrastruktur berpengaruh positif signifikan ditolak.

2. Variabel Pembangunan Ekonomi (X2): Memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7391. Karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel pembangunan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi berpengaruh positif signifikan ditolak.

Dengan demikian, berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel infrastruktur dan pembangunan ekonomi secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian.

2. Uji F (Simultan)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas F-statistic pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun hasil uji F dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut, sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2020).

Tabel 4.12 Hasil Uji F

F-statistic (Uji F)	0.306498
Prob(F-statistic)	0.748925
<i>Sumber: Olah data Eviews 12</i>	

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil uji F, diperoleh nilai F-statistic sebesar 0,306498 dengan probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,748925. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga secara statistik variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel

dependen. Dengan demikian, hipotesis H5 yang menyatakan bahwa infrastruktur yang diukur melalui akses air minum layak dan pembangunan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Sugiyono, 2020), uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yang dapat dilihat melalui nilai *R-squared* dan *Adjusted R-squared* yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan aplikasi EViews 12.

Tabel 4.13 Hasil Uji R^2

R-squared	0.109210
Adjusted R-squared	-0.247106

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,109210 atau 10,92%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel infrastruktur (X1) dan pembangunan ekonomi (X2) mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 10,92%, sedangkan sisanya sebesar 89,08% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Sementara itu, nilai *Adjusted R-squared* sebesar -0,247106 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan ukuran sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen menjadi sangat rendah. Nilai *Adjusted R-squared* yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa model regresi belum mampu memberikan daya jelas yang baik terhadap variabel dependen, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain di luar

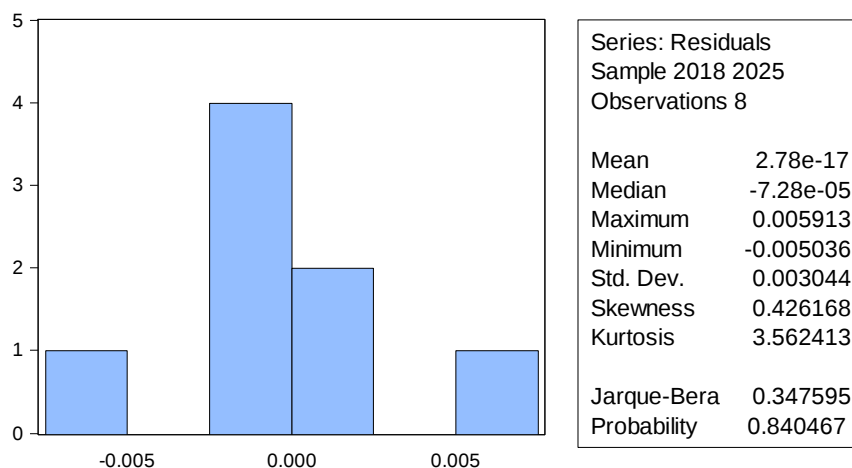
model yang lebih dominan memengaruhi variabel dependen selama periode penelitian.

4.2.6 Uji Asumsi Klasik Model Ketimpangan Pendapatan (Y2)

1. Uji Normalitas

Menurut (Sugiyono, 2020), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik untuk digunakan dalam pengujian hipotesis adalah model yang memiliki residual yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga hasil analisis regresi dapat memberikan estimasi yang valid dan dapat dipercaya. Hasil pengujian normalitas residual dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut :

Gambar 4.3 Uji Normalitas Ketimpangan Pendapatan



Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan melalui histogram residual, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,347595 dengan nilai probabilitas (Probability) sebesar 0,840467. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat

signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Menurut (Sugiyono, 2020) Sugiyono, model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami masalah multikolinearitas. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan bantuan aplikasi EViews 12.

Tabel 4.14 Hasil Uji *Variance Inflation Factors*

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.005425	3345.578	NA
X1	8.37E-07	3905.401	2.837110
X2	1.61E-08	37.59601	2.837110

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF), diketahui bahwa nilai *Centered VIF* untuk variabel X1 sebesar 2,837110 dan variabel X2 sebesar 2,837110. Nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Dengan demikian, variabel independen dalam penelitian ini, yaitu infrastruktur dan pembangunan ekonomi, tidak memiliki hubungan linear yang tinggi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Sugiyono, 2020), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode *White Heteroskedasticity Test* dengan bantuan aplikasi EViews 12, dan hasil pengujiannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.15 Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1,155571	Prob. F(4,1)	0,5951
Obs*R-squared	4,932818	Prob. Chi-Square(4)	0,2943
Scaled explained SS	0,341300	Prob. Chi-Square(4)	0,9870

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.15, diketahui bahwa nilai probabilitas *Obs*R-squared* sebesar 0,2943 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,5951 juga lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan (*homoskedastis*), sehingga model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4. Uji Autokorelasi

Menurut (Sugiyono, 2020), uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan bantuan aplikasi EViews 12.

Hasil pengujian autokorelasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.16 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey			
F-statistic	19.12380	Prob. F(1,4)	0.0119
Obs*R-squared	6.616145	Prob. Chi-Square(1)	0.0101

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.16 hasil uji autokorelasi *Breusch–Godfrey*, diperoleh nilai F-statistic sebesar 19,12380 dengan probabilitas (*Prob. F*) sebesar 0,0119. Selain itu, nilai *Obs*R-squared* sebesar 6,616145 dengan probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,0101. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi autokorelasi pada residual model regresi, sehingga residual antarperiode pengamatan saling berkorelasi. Dengan demikian, model regresi belum memenuhi asumsi klasik autokorelasi dan perlu dilakukan perbaikan model untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4.2.7 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Menurut (Sugiyono, 2020), pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas (*p-value*) lebih besar dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.17 Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.494753	0.073652	6.717482	0.0011
X1	-0.001481	0.000915	-1.618777	0.1664
X2	-0.000374	0.000127	-2.945178	0.0321

Sumber: Olah data Eviews 12

1. Berdasarkan Tabel 4.17 hasil uji t, diketahui bahwa variabel infrastruktur memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1664 ($> 0,05$). Dengan demikian, hipotesis H3 yang menyatakan bahwa infrastruktur yang diukur melalui persentase rumah tangga dengan akses air minum layak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia diterima.
2. Sementara itu, variabel pembangunan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0321 ($< 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis H4 yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia juga diterima.

Secara keseluruhan, hasil uji parsial menunjukkan bahwa hanya variabel pembangunan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan selama periode penelitian.

2. Uji F (Simultan)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas F-statistic pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun hasil uji F dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut, sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2020).

Tabel 4.18 Uji F

F-statistic	26.90628
Prob. (F-statistic)	0.002107

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.18 hasil uji F, diperoleh nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,002107. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis H6 yang menyatakan bahwa infrastruktur yang diukur melalui akses air minum layak dan pembangunan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Sugiyono, 2020), uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yang dapat dilihat melalui nilai *R-squared* dan *Adjusted R-squared* yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan aplikasi EViews 12.

Tabel 4.19 Uji R^2

R-squared	0.914984
Adjusted R-squared	0.880978

Sumber: Olah data Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.19 hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,914984 atau 91,49%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel infrastruktur (X1) dan pembangunan ekonomi (X2) mampu menjelaskan variabel ketimpangan pendapatan (Y2) sebesar 91,49%, sedangkan sisanya sebesar 8,51% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai

Adjusted R-squared sebesar 0,880978 atau 88,09% menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen tetap tergolong sangat kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki daya jelaskan yang tinggi dalam menggambarkan pengaruh infrastruktur dan pembangunan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan selama periode penelitian.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Berdasarkan hasil uji hipotesis regresi, variabel infrastruktur yang diproksikan melalui persentase rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukkan koefisien positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2018–2025. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini ditolak.

Secara teoritis, hasil penelitian ini merujuk pada Teori Pertumbuhan Neoklasik Robert Solow yang terdapat dalam dalam penelitian (Mankiw, 2021), yang memandang infrastruktur sebagai komponen akumulasi modal fisik (kapital) yang krusial untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. Dalam kerangka Solow, infrastruktur yang memadai berperan sebagai katalisator dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan produktivitas agregat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Namun, tidak signifikannya pengaruh dalam model ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air minum layak di Indonesia belum memberikan dampak ekonomi langsung dalam jangka pendek. Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur air minum lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan

kesehatan masyarakat (*human capital*), sehingga dampaknya terhadap output ekonomi bersifat jangka panjang dan tidak langsung. Selain itu, efektivitas infrastruktur sangat bergantung pada faktor komplementer lainnya, seperti investasi, kemajuan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia.

Temuan ini selaras dengan studi (Prabowo & Makrufan, 2021) yang mengonfirmasi bahwa infrastruktur air bersih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan kesehatan masyarakat. Hasil ini juga didukung oleh (Hartati et al., 2020) yang menyatakan pembangunan infrastruktur mampu memicu pertumbuhan daerah, serta (C. Li et al., 2017) yang menekankan bahwa infrastruktur meningkatkan konektivitas aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, terdapat perbedaan hasil dengan penelitian (Hulu & Wahyuni, 2021) serta (Abdur-Rabb et al., 2024) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan. Perbedaan ini kemungkinan besar dipicu oleh variasi indikator yang digunakan sementara penelitian terdahulu cenderung menggunakan proksi infrastruktur yang lebih luas (seperti jalan, listrik, dan transportasi yang berdampak langsung pada biaya logistik), penelitian ini membatasi fokus pada akses air minum layak. Sebagai simpulan, infrastruktur air minum layak di Indonesia belum menunjukkan dampak signifikan secara statistik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara langsung dalam periode penelitian.

4.3.2 Pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel pembangunan ekonomi yang diprosikan melalui PDRB per kapita menunjukkan koefisien positif namun tidak

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, H2 dalam penelitian ini diterima.

Secara teoretis, temuan ini mengacu pada pandangan (Michael P. Todaro, 2020) mengenai hakikat pembangunan ekonomi. (Michael P. Todaro, 2020) menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan naiknya kapasitas produksi dan daya beli masyarakat, yang secara teoretis idealnya mendorong aktivitas konsumsi dan investasi. Namun, (Michael P. Todaro, 2020) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat multidimensi peningkatan output tidak akan berdampak optimal tanpa dibarengi dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas hidup. Hasil penelitian ini mengonfirmasi argumen tersebut: peningkatan PDRB per kapita di Indonesia belum mampu memberikan dampak signifikan karena adanya kesenjangan distribusi pembangunan antarwilayah yang menghambat agregasi dampak pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Temuan ini selaras dengan penelitian (Hartini, 2017) yang menemukan bahwa pengaruh PDRB per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat positif namun tidak signifikan, dengan catatan bahwa dampak tersebut memerlukan dukungan faktor komplementer seperti infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hartati et al., 2020) yang menyatakan bahwa signifikansi pengaruh pembangunan ekonomi sering kali tereduksi oleh ketimpangan antarwilayah dan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tidak merata di Indonesia.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan perbedaan hasil dengan (E. Glaeser, 2010) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan

signifikan melalui mekanisme peningkatan produktivitas dan efisiensi wilayah. Perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh periode pemulihan pasca-pandemi COVID-19 yang menghambat efektivitas transmisi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, meskipun PDRB per kapita berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, pengaruhnya masih lemah secara statistik. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita perlu didukung oleh investasi produktif, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.3.3 Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel infrastruktur (persentase rumah tangga dengan akses air minum layak) memiliki koefisien negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini ditolak.

Secara teoretis, temuan ini berkaitan dengan Teori Konvergensi (Diallo, 2020) yang memandang bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi instrumen redistribusi untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Infrastruktur air minum layak merupakan bentuk investasi *human capital* yang mendasar ketersediaannya seharusnya meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan kesehatan dan produktivitas, yang pada gilirannya menekan ketimpangan pendapatan. Namun, tidak signifikannya pengaruh ini dalam model mengindikasikan bahwa mekanisme transmisi infrastruktur dasar menuju penurunan ketimpangan di Indonesia masih terhambat. Hal ini kemungkinan terjadi karena pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga manfaat ekonominya belum terdistribusi secara inklusif ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, faktor

struktural lain seperti kualitas pendidikan, kebijakan fiskal, dan distribusi kesempatan kerja sering kali memberikan dampak yang jauh lebih dominan daripada ketersediaan akses air minum dalam membentuk struktur pendapatan nasional.

Temuan ini selaras dengan (Prabowo & Makrufan, 2021) yang menegaskan bahwa meski infrastruktur air bersih krusial bagi kesejahteraan, pengaruhnya belum cukup kuat untuk menekan ketimpangan pendapatan secara langsung. Senada dengan itu, (Hartini, 2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi saja tidak menjamin penurunan ketimpangan jika pembangunan tidak disertai dengan pemerataan akses yang merata.

Di sisi lain, terdapat perbedaan hasil dengan penelitian (Makmuri, 2017) serta (Wafiri, 2024) yang menemukan pengaruh signifikan infrastruktur terhadap penurunan ketimpangan. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh variasi proksi variabel penelitian terdahulu umumnya menggunakan indikator infrastruktur fisik makro (seperti jalan, listrik, dan transportasi) yang memiliki kaitan langsung dengan akses pasar dan mobilitas ekonomi, sementara penelitian ini membatasi fokus pada infrastruktur dasar (air minum).

Meskipun pembangunan infrastruktur air minum layak cenderung menurunkan ketimpangan, pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur agar manfaatnya lebih efektif dalam menekan ketimpangan.

4.3.4 Pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi, yang diukur melalui PDRB per kapita, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, H4 dalam penelitian ini diterima.

Temuan ini memberikan dukungan empiris yang kuat terhadap Hipotesis Kurva U Terbalik (*inverted U hypothesis*) yang dikemukakan oleh Simon Kuznets dalam penelitian (Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008). Secara teoritis, Kuznets menjelaskan bahwa dinamika ketimpangan pendapatan memiliki hubungan non-linear dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat. Namun, setelah mencapai titik tertentu, peningkatan pendapatan per kapita akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang semakin merata. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa Indonesia telah berada pada fase lanjut pembangunan di mana peningkatan PDRB per kapita berkontribusi pada penurunan nilai *Gini Ratio*. Peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas yang terjadi telah menciptakan kesempatan pendapatan yang lebih luas dan merata bagi berbagai lapisan masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia tercermin dari meningkatnya kualitas hidup, daya beli, dan akses yang lebih luas terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ketika manfaat ekonomi terdistribusi secara lebih merata, kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan dapat diminimalisir. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi pendorong utama pertumbuhan

output nasional, tetapi juga berperan krusial sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Makmuri, 2017), (Prabowo & Makrufan, 2021), serta (Wafiri, 2024) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan pemerataan infrastruktur merupakan kunci dalam menekan ketimpangan pendapatan. Meskipun terdapat studi lain seperti (Hartini, 2017) serta (Ardiani & Prabowo, 2024) yang menunjukkan hasil berbeda bahwa pertumbuhan ekonomi terkadang justru memperlebar ketimpangan variasi tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan periode penelitian, karakteristik wilayah, dan struktur distribusi pendapatan yang unik di setiap daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga pembangunan ekonomi yang inklusif melalui pemerataan investasi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan perluasan kesempatan kerja agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata.

4.3.5 Pengaruh Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi secara Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa infrastruktur (akses air minum layak) dan pembangunan ekonomi (PDRB per kapita) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, H5 dalam penelitian ini ditolak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa akses air minum layak dan PDRB per kapita belum mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan selama periode penelitian.

Secara teoretis, temuan ini relevan dengan Model Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik Solow, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Menurut (Mankiw, 2021), penambahan modal fisik dalam hal ini infrastruktur dasar seperti akses air minum tidak serta merta menjamin akselerasi pertumbuhan ekonomi jika tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan faktor produksi lainnya. Peningkatan infrastruktur memerlukan sinergi dengan variabel lain agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap output nasional.

Dalam perspektif Pembangunan Ekonomi (Michael P. Todaro, 2020), hubungan antara PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi sering kali tidak berjalan linear dalam jangka pendek. Peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu menciptakan *multiplier effect* yang optimal karena adanya kendala struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, disparitas pembangunan antarwilayah, serta rendahnya produktivitas di sektor-sektor kunci. Hal ini menjelaskan mengapa peningkatan akses infrastruktur dan pendapatan di Indonesia belum secara otomatis terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara simultan.

Secara empiris, hasil ini didukung oleh penelitian (Straub, 2008), yang menegaskan bahwa dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas tata kelola (*governance*), efisiensi investasi, dan kondisi institusional suatu negara. Temuan (Irmén & Kuehnel, 2009) juga sejalan dengan

penelitian ini, di mana kontribusi infrastruktur cenderung tidak signifikan apabila tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas sektor ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, (C. Li et al., 2017) menyatakan bahwa dampak infrastruktur bersifat heterogen dan sangat bergantung pada karakteristik spesifik ekonomi di masing-masing wilayah.

Meskipun akses air minum layak dan PDRB per kapita di Indonesia meningkat selama periode penelitian, keduanya belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara simultan. Pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stabilitas makroekonomi, investasi, inovasi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dasar dan pendapatan masyarakat perlu didukung kebijakan pembangunan yang komprehensif agar memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3.6 Pengaruh Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi secara Simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), diketahui bahwa infrastruktur yang diukur melalui akses air minum layak dan pembangunan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB per kapita berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara pembangunan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur dasar.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi Hipotesis Kuznets yang dikemukakan oleh Simon Kuznets dalam (Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008), yang menjelaskan bahwa hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan bersifat non linear. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat, namun akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan pemerataan pembangunan, termasuk infrastruktur dasar. Dalam konteks Indonesia, peningkatan PDRB per kapita yang diiringi dengan perluasan akses infrastruktur menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju distribusi pendapatan yang lebih merata.

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan Teori Dualisme Ekonomi Arthur Lewis dalam (Junaedi et al., 2026) yang menekankan adanya perbedaan produktivitas antara sektor modern dan tradisional sebagai sumber utama ketimpangan. Dalam hal ini, infrastruktur berperan sebagai katalisator penting dalam mengurangi disparitas tersebut. Ketersediaan infrastruktur yang merata, khususnya akses air minum layak, dapat meningkatkan produktivitas sektor tradisional sekaligus memperkecil kesenjangan dengan sektor modern, sehingga mendorong proses integrasi ekonomi antarwilayah.

Dari perspektif lain, pendekatan kapabilitas Amartya Sen dalam penelitian (Adon et al., 2023) menegaskan bahwa ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan, tetapi juga mencerminkan perbedaan kemampuan (*capability inequality*) individu dalam mengakses dan memanfaatkan peluang ekonomi. Dalam hal ini, akses terhadap infrastruktur dasar seperti air minum layak berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan, efisiensi waktu, serta produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya memperluas kapabilitas individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Secara empiris, hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Abdur-Rabb et al., 2024), (D. Sari et al., 2025), serta (Ardiani & Prabowo, 2024) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak akan secara otomatis menurunkan ketimpangan apabila tidak disertai dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi empiris di Indonesia pada periode 2018–2025 turut mendukung temuan tersebut. Peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum layak dari 83,08% menjadi 90,25% diiringi dengan penurunan Gini Ratio dari 0,354 menjadi 0,322. Pola ini menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan infrastruktur dasar dan perbaikan distribusi pendapatan. Dengan demikian, sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif.

Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah perlu terus memperkuat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar sebagai fondasi utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pemerataan akses tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara lebih adil di seluruh wilayah Indonesia.